BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah di dunia terlihat begitu pesat. Sistem dan industri keuangan syari'ah tidak lagi menjadi isu lokal yang sifatnya terbatas pada negara-negara Islam saja, tetapi juga telah menjadi *trend global* di mana negara-negara non-muslim sudah mengambil posisi dan inisiatif untuk mengadopsi serta mengembangkan sistem sekaligus lembaga keuangan syari'ah. Negara-negara yang memiliki lembaga keuangan terkemuka seperti Inggris, Prancis, Jepang, Hongkong dan Singapura terlihat berlomba-lomba untuk menjadikan negara mereka sebagai pusat keuangan syari'ah, baik internasional maupun regional.

Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, *pertama*, semakin banyak negara baik Islam maupun non-muslim mengembangkan industri keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. *Kedua*, krisis keuangan yang menghantam banyak negara, tidak hanya negara-negara *emerging market* (1998-2005) tetapi juga negara-negara maju (2008-2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak

pihak untuk mencari alternatif sistem keuangan yang lebih kuat. Alternatif sistem keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.

Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syari'ah di dunia menyebar pada praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan syari'ah dipelopori dengan berdirinya BPR Syari'ah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992 (berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang bank bagi hasil).

Semakin berkembangnya ekonomi di suatu negara, semakin meningkat pula permintaan kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Hal ini juga yang mendorong pemerintah maupun pihak swasta untuk ikut berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.

Oleh karena itu perbankan syari'ah lahir sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al Qur'an dan hadits Nabi SAW.¹ Sebagaimana dinyatakan dalam QS al Nisa ayat 161:

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002 hlm 13

وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ^٢
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. al Nisa’: 161)²

Maksudnya, orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaithan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Lembaga keuangan syari’ah menunjukkan potensi yang besar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank konvensional yang memulai dengan unit usaha syari’ah. Baik lembaga keuangan syari’ah maupun lembaga keuangan konvensional tentu bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini biasa disebut dengan pembiayaan ataupun kredit dalam lembaga konvensional.

Meskipun banyak terjadi pertumbuhan Bank Mu’amalah, BPR Syari’ah dan Bank Syari’ah cabang dari Bank konvensional, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat

² Yaysan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 104.

lapisan bawah.³ Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat lapisan bawah sulit untuk memenuhi persyaratan teknis bank.⁴ Oleh karena itu perlu dikembangkannya lembaga- lembaga keuangan syari'ah yang sederhana, cepat dan mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat bawah. Di mana lembaga tersebut tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengalami kemacetan dalam operasionalnya.

Dengan adanya lembaga keuangan syari'ah (non bank) diharapkan dapat membantu para pengusaha kecil tradisional dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mereka, terutama dalam hal pengadaan modal usaha, ini menjadi kendala utama mereka dalam mengembangkan unit-unit usaha mereka. Sekaligus lembaga tersebut diharapkan dapat benar-benar menciptakan perekonomian yang adil dan merata yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Karakteristik industri keuangan syari'ah yang masih baru dan struktur usaha di perekonomian Indonesia yang dominan usaha mikro kecil, kapasitas terbatas, variasi lembaga yang banyak dan sebaran jaringan yang luas membuat industri keuangan syari'ah nasional yang ada saat ini dapat dikatakan optimal menjadi lembaga *intermediari* bagi unit usaha mikro kecil

³ Heri Sudarsono, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 32.

⁴ Abd. Madjid Baihaqi & Saifudin A. Rosyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah; Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: PINBUK, 2000, hlm. 82.

Indonesia. Tetapi hal itu tidak kemudian bermakna Indonesia tidak membutuhkan lembaga keuangan syari'ah yang besar. Pada perkembangan selanjutnya dalam rangka mewujudkan tingkat daya saing industri keuangan syariah nasional berdasarkan *scale of economies*-nya, diperlukan upaya untuk membesarkan ukuran perusahaan-perusahaan keuangan syariah yang ada.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Peluang ini sangatlah menjanjikan karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariat Islam sebaik-baiknya. Selain itu, dengan adanya prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syariah diharapkan dapat meminimumkan dampak negatif dari bunga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2002 tepatnya pada saat Rapat Anggota Tahunan yang ke-28, mengamanatkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan Pemalang untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Maka Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan Pemalang pada tanggal 17 Agustus 2004 meresmikan berdirinya Kospin Jasa Layanan Syari'ah.

Kospin Jasa Syari'ah terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah yang melakukan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan prinsip syari'ah. Prinsip

syari'ah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.⁵

Dengan fokus usaha pada penghimpunan dana berupa simpanan dari anggota atau calon anggota untuk kemudian disalurkan kembali dengan bentuk pinjaman kepada anggota atau calon anggota secara luas, telah menjadikan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan Syari'ah, sebagai sebuah lembaga keuangan yang terpercaya pilihan masyarakat. Bahkan saat ini, dengan jaringan anggota dan mitra usaha yang tersebar diberbagai wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Yogyakarta. Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan Syari'ah telah mampu menjadi bagian kekuatan ekonomi masyarakat yang patut diperhitungkan dalam perekonomian nasional.⁶

Untuk memberikan pelayanan kepada anggota atau calon anggota, Kospin Jasa Layanan Syari'ah mempunyai beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Pada Kospin Jasa Layanan Syari'ah, pembiayaan ada 3 jenis produk yaitu produk pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan

⁵ Brosur Company Profile Kospin Jasa Syari'ah

⁶ www.kospinjasasyari'ah.com

analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara KUKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 27-28 tentang pengendalian resiko.⁷

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya adalah (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*), kaitannya dalam bank syari'ah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan al Qur'an dan hadits (syari'ah) sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syari'ah ataupun lembaga keuangan syari'ah. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 471.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.⁸

Sebagai lembaga keuangan syari'ah produk-produk yang ditawarkan Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang pada masyarakat sangatlah berbeda dengan koperasi konvensional, di mana produk-produk yang ditawarkan Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam diantaranya adalah produk-produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang menawarkan berbagai produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah*. Namun sebelumnya pihak Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang menganalisa terlebih dahulu apakah usaha dari anggota layak atau tidak untuk dibiayai. Selanjutnya pihak Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang juga meminta rencana anggaran dana dari anggota atau calon anggota. Hal ini bertujuan agar pihak Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang dapat menentukan pengabulan permohonan pembiayaan dari anggota atau calon anggota.

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alvabet, Cet. 4 Mei 2006, hlm 222

Berikut daftar tabel jumlah anggota/calon anggota Kospin Jasa Syariah dari tahun 2010 hingga tahun 2013⁹

No	Tahun	Anggota	Calon Anggota	Jumlah Calon Anggota melakukan Pembiayaan	Jumlah calon Anggota yang bermasalah
1	2010	3	214	54	5
2	2011	3	375	87	10
3	2012	3	517	100	12
4	2013	5	1113	105	15

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan jumlah calon anggota terus terjadi. Namun jumlah anggota baru meningkat setelah tahun 2013. Jumlah anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan pun meningkat pula. Jumlah anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah calon anggota yang ada. Bahkan dapat dikatakan tidak ada separuh dari jumlah total anggota/calon anggota. Hal ini dikarenakan tidak semua pengajuan pembiayaan dikabulkan oleh pihak Kospin Jasa Syariah. Jumlah Calon Anggota yang mengalami permasalahan termasuk dalam kategori yang masih sedikit. Namun tidak dapat dipungkiri setiap tahun mengalami peningkatan terhadap Calon Anggota yang bermasalah.

⁹ Hasil dokumentasi yang diberikan oleh Ibu Anggie selaku Teller Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang

Oleh sebab itu Kospin Jasa Syari'ah Pemalang menggunakan *Rescheduling* untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah. Cara ini dinilai cukup efektif karena memberi cukup kelonggaran kepada anggota/calon anggota yang sedang dalam masa kesulitan dalam membayar angsuran.

Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA) berkantor Pusat di Pekalongan serta memiliki 94 kantor layanan termasuk layanan unit syariah dan merupakan Koperasi Terbaik tingkat nasional.¹⁰

Dari uraian di atas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada di Kospin Jasa Syari'ah sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Penyebab dan Langkah Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syari'ah cabang Pemalang?
2. Langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syari'ah cabang Pemalang?

¹⁰ www.kospinjasa.com

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syari'ah Cabang Pemalang
2. Untuk mengetahui penanganan Kospin Jasa Layanan Syari'ah cabang Pemalang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai praktek pembiayaan di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang.
2. Penulis dan pembaca dapat memperoleh deskripsi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
3. Penulis dan pembaca dapat memperoleh cara menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah atau mengalami kredit macet.
4. Sebagai tambahan referensi di Perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Niamil Hida 2101220 Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul Skripsi “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*”.¹¹

Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *musyarakah* di Kospin Jasa Syari’ah Pekalongan, serta mengetahui produk-produk apa saja yang masuk dalam akad *musyarakah*.

Hasil dari penelitian ini bahwa pembiayaan yang dipraktekkan di Kospin Jasa Syari’ah Pekalongan ada beberapa poin yang tidak jauh beda dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu menggunakan penetapan nominal uang yang harus dibagi dengan pihak Kospin Jasa Syari’ah diawal perjanjian kontrak *musyarakah*, walaupun setiap bulannya bisa berbeda jumlahnya melalui negoisasi dua belah pihak pada waktu akad tetapi mengandung unsur *gharar* karena belum mengetahui hasil dari usaha, hal ini menjadikan anggota menjadi pihak yang tidak diuntungkan karena tidak melihat apakah usaha anggota mendapatkan laba atau rugi. Dengan memakai agunan atau jaminan dalam akad *musyarakah*, tatkala anggota kolaps nilai jaminan milik Kospin Jasa Syari’ah.

¹¹ Muhammad Niamil Hida, “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*”, Skripsi Fakultas Syariah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2008, t.d.

Hasil penelitian diatas sangatlah berbeda dengan yang penulis temukan di Kospin Jasa Syari'ah Layanan Pemalang. Dari penelitian penulis sendiri diperoleh hasil bahwa bagi hasil pada akad *Musyarakah* telah ditentukan diawal perjanjian/*akad* dan tidak dapat berubah karena merupakan kesepakatan bersama. Dan juga pada barang jaminan/agunan anggota/calon anggota yang tidak mampu membayar, maka barang jaminan/agunannya tidak menjadi milik Kospin Jasa Syari'ah. Melainkan harus dilelang dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan. Hasil dari lelang barang jaminan itulah yang akan digunakan untuk membayar sisa angsuran yang belum sempat terbayarkan dikarenakan anggota/calon anggota mengalami permasalahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ika Novita Dewi A12.2006.02237 Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan judul skripsi "*Keputusan pemberian pembiayaan Murabahah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*".¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan Oleh Naelus Sana 052411067 jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010 dengan judul skripsi "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian*

¹² Ika Novita Dewi, *Keputusan pemberian pembiayaan Murabahah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*, Semarang: <http://www.dinus.ac.id/skripsi/index.php/home/skripsi/9020>

Pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil di Kabupaten Demak".¹³

Fokus penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemberian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di kabupaten Demak.

Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa secara keseluruhan atau serentak terdapat pengaruh yang signifikan faktor 5C terhadap pemberian pembiayaan di BMT kabupaten Demak. Hal ini dibuktikan dengan hasil *Component Transformation Matrix* yaitu terdapat 5 variabel *character, capacity, capital, collateral, condition*. Sedangkan besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap pemberian pembiayaan adalah sebesar 85,1%.

Faktor *character* berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian pembiayaan hal ini disebabkan semakin baik data tentang akhlak, karakter, kejujuran maka semakin besar pula kepercayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tersebut dalam pemberian pembiayaan. Beberapa petunjuk bagi BMT untuk mengetahui karakter nasabah adalah mengenal dari dekat, mengumpulkan keterangan dari aktivitas calon nasabah, Setelah semua data terkumpul dengan baik, maka pihak karyawan bagian pembiayaan BMT dapat menganalisis tentang kejujuran nasabah tersebut. Jika ditemukan kejujuran yang positif maka semakin

¹³ Naelus Sana, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil di Kabupaten Demak*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010.

besar pula pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada BMT. Sedangkan faktor *capacity* terbukti berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan. Hal ini disebabkan karena *capacity* menyangkut pengalaman usaha, memiliki prestasi, rasio financial, laporan keuangan, tidak memiliki pinjaman lain dan kemampuan pelunasan. Dengan mempunyai prestasi nasabah juga dapat mempunyai kemampuan pelunasan yang tinggi ini akan berdampak juga pada pemberian pembiayaan. Apabila terdapat penilaian yang baik terhadap *capacity* maka semakin besar pula pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada BMT. Faktor *collateral* berpengaruh signifikan terhadap pemberian pembiayaan hal ini disebabkan semakin baik data tentang jaminan, kepemilikan jaminan, penilaian jaminan maka semakin besar pula kepercayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tersebut dalam pemberian pembiayaan. Beberapa petunjuk bagi BMT untuk mengetahui kepemilikan jaminan nasabah adalah dengan cara melihat adanya surat-surat kepemilikan barang jaminan tersebut, mengumpulkan keterangan dari barang jaminan calon nasabah, setelah semua data terkumpul dengan baik, maka pihak karyawan bagian pembiayaan BMT dapat menganalisis tentang barang jaminan, kepemilikan jaminan, penilaian jaminan nasabah. Jika ditemukan jaminan hak milik pribadi yang positif maka semakin besar pula pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada BMT.

Faktor *capital* berpengaruh signifikan terhadap pemberian pembiayaan hal ini disebabkan semakin baik data tentang kondisi rumah tangga, tanggungan hidup, hubungan personal, jarak, tempat atau lokasi maka semakin besar pula kepercayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tersebut dalam pemberian pembiayaan. Mengumpulkan keterangan dari kondisi rumah tangga nasabah, Setelah semua data terkumpul dengan baik, maka pihak karyawan bagian pembiayaan BMT dapat menganalisis tentang kondisi rumah tangga, tanggungan hidup, hubungan personal, jarak, tempat atau lokasi usaha. Jika ditemukan kondisi rumah tangga yang baik dan hubungan antar personel sangat erat serta jarak dekat dan tempat lokasi strategis untuk usaha maka semakin besar pula pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada BMT. Faktor *Condition* terbukti berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan. Hal ini disebabkan karena condition menyangkut modal, prospek usaha, tingkat keuntungan usaha, pemakaian pembiayaan, risiko kegagalan, kendala usaha, kondisi ekonomi, kondisi produk. Dengan mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi juga dapat mempunyai produk yang baik, serta memiliki tingkat resiko yang relatif lebih rendah ini akan berdampak pada pemberian pembiayaan apabila semakin tinggi tingkat keuntungan dan prospek usahanya itu bagus maka semakin besar pula pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada BMT.

Hasil penelitian diatas memiliki persamaan, yaitu BMT di Kabupaten Demak serta Kospin Jasa Syari'ah Pemalang dalam memberikan keputusan pengabulan pembiayaan dengan menggunakan faktor 5C. Yaitu *Character, Capital, Condition, Collateral* dan *Capacity*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah 042311101 Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul skripsi “*Analisis Akad Mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.*”¹⁴

Fokus penelitian ini adalah penelitian dari sisi syari'ah yang meliputi aspek akad *mudharabah* yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.

Perbedaan yang terdapat pada kedua penelitian ini adalah pada akadnya. BMT Fosilatama Banyumanik menerapkan akad *Mudharabah* pada pembiayaan, sedangkan Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang dalam memberikan pembiayaan menggunakan akad *Musyarakah, Murabahah* dan *Ijarah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Qosim Muamar 2101119 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

¹⁴ Nur Halimah, *Analisis Akad Mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Walisongo Semarang 2006 “*Analisis Penanggulangan Risiko Kredit (credit risk) di BPR Syari'ah Asad Alif Kendal.*”¹⁵

Hasil penelitian yang membedakan penulis dengan Saudara Qosim Muamar yaitu penulis melakukan studi kasus di Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Jasa, sedangkan Saudara Qosim Muamar melakukan studi kasus di BPRS (Bank Perkreditan Syariah) jadi sangat memungkinkan perbedaan pula dalam perhitungan bagi hasil maupun cara pembayaran di kedua Lembaga. Bagi anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan di Kopsin Jasa Syari'ah, pada akhir tahun akan mendapat Sisa Hasil Usaha yang akan diberikan sesuai dengan besaran usaha yang telah dijalani oleh anggota/calon anggota.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data-data yang akurat yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah

¹⁵ Qosim Muamar, *Analisis Penanggulangan Resiko Kredit (credit risk) di BPR Syariah Asad Alif Kendal*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 2.

yang dilakukan di Kospin Jasa Layanan Syari'ah cabang Pematang untuk menggali data-data yang relevan. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁷ Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data dikumpulkan langsung oleh penulis melalui wawancara atau *interview* dan *dokumentasi* dengan pegawai yang bersangkutan.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005 hlm 5

¹⁸ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 4

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm 91

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kaitannya dengan ini, penulis mencari informasi melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang bersangkutan supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk-produk maupun proses yang terjadi di Kospin Jasa Layanan Syari'ah Cabang Pematang Siantar.
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dokumen resmi, dan sebagainya.²⁰ Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan melalui arsip-arsip, buku-buku serta catatan-catatan dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁰ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 116.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi, dalam pengelolaan data ini yang digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, tekstual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²¹

Metode analisis yang penulis gunakan dalam Skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian apa adanya secara proporsional, sedangkan maksud analitis adalah menelaah sesuatu secara mendalam dengan memberi penjelasan dalam suatu karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan yang mengalami masalah serta cara penyelesaiannya di Kospin Jasa Layanan Syari'ah Cabang Pernalang.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab:

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 63.

BAB I: Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: berisi tentang koperasi syari'ah dan pembiayaan. Pertama tentang koperasi syari'ah, meliputi pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, tujuan pengembangan koperasi syariah, pengertian dan dasar hukum pembiayaan, unsur-unsur dan jenis-jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, syarat dan rukun pembiayaan, tujuan dan manfaat pembiayaan serta prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam.

BAB III: tentang pembiayaan bermasalah dan penanganannya di Kospin Jasa Layanan Syari'ah Cabang Pemalang. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab pembahasan, yang pertama mengenai gambaran umum Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang. Kedua pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya. Ketiga penanganan pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

BAB IV: berisi analisis pembiayaan bermasalah dan penanganannya di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang. Pertama membahas tentang analisis pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah cabang Pemalang. Kedua membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang.

BAB V: Sebagai bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.